

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, maka sangat dibutuhkan peran pendidik/guru yang profesional. Jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional, untuk itu guru dituntut agar berkembang sesuai perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat; guru dituntut agar menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing di forum regional, nasional, maupun internasional.

Tidak bisa dinafikan, gaya guru dengan mengajar yang membosankan sering terjadi saat ia berdiri di depan peserta didiknya. Hal itu disebabkan oleh karena guru tidak pernah mengevaluasi proses pembelajarannya yang sudah diimplementasikan. Dampaknya, peserta didik tidak dapat konsentrasi, kemudian merasa jenuh, sebal, bahkan membuat ulah dan bikin gaduh. Kalaupun tampak mendengarkan, itu disebabkan karena faktor lain, yaitu ketakutan. Akibatnya, proses pembelajaran pun tidak dapat optimal. Karena itu, guru perlu mengevaluasi proses pembelajarannya di kelas. Salah satu kiatnya, guru perlu melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) yang merupakan jalan efektif untuk melakukan evaluasi dari kinerja yang telah dilakukan (Suara Merdeka, 08 Desember 2007).

Data Balitbang 2004 menyebutkan, persentase guru yang tidak layak mengajar masih tinggi. Data yang terdapat dalam *Educational Statistics in Brief in Indonesian, Ministry of National Education* juga menunjukkan adanya kesenjangan antara Undang-Undang (UU) 14/ 2005 dengan realita di lapangan. UU tersebut menjelaskan tentang guru, dosen, dan Peraturan Pemerintah (PP) RI 19/2005 berkaitan dengan standar nasional pendidikan. Bahwa Kenyataan di lapangan, masih banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi sarjana (S1). Dari sebanyak 3.014.750 tenaga pendidik mulai tingkat TK hingga perguruan tinggi, di Indonesia, menurut Dr. Djali, sekitar 58,35 % belum memenuhi standar kualifikasi sarjana (Harian Suara Merdeka, 25 Juli 2006).

Dalam kultur masyarakat Indonesia sampai saat ini pekerjaan guru masih cukup tertutup. Bahkan atasan guru seperti kepala sekolah dan pengawas sekali pun tidak mudah untuk mendapatkan data dan mengamati realitas keseharian *performance* guru di hadapan siswa. Memang program kunjungan kelas oleh kepala sekolah atau pengawas, tidak mungkin ditolak oleh guru. Akan tetapi tidak jarang terjadi guru berusaha menampakkan kinerja terbaiknya baik pada aspek perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran hanya pada saat dikunjungi. Selanjutnya ia akan kembali bekerja seperti sedia kala, kadang tanpa persiapan yang matang serta tanpa semangat dan antusiasme yang tinggi (Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas, 2008: 1).

Berbagai upaya dalam peningkatan kinerja guru banyak dilakukan oleh pemerintah, baik peningkatan tunjangan-tunjangan bagi guru, peningkatan gaji, pemberian pendidikan bagi guru, dan lain sebagainya.

Peningkatan kinerja tidak lepas juga dari faktor-faktor yang berada dalam lingkungan kerja (sekolah tempat bekerja) guru serta dari diri guru itu sendiri seperti kompetensi profesional, sistem manajemen mutu, maupun kepemimpinan kepala sekolah. Diantara faktor-faktor tersebut, perlu dikaji apakah perilaku pemimpin, kompetensi profesional, dan sistem manajemen mutu mempengaruhi kinerja guru demi tercapainya tujuan organisasi. Para guru membentuk suatu persepsi subyektif keseluruhan mengenai organisasi berdasarkan pada faktor-faktor seperti resiko, tekanan pada tim, dan dukungan orang.

Fungsi pemimpin dalam kelompok yaitu agar kelompok yang dipimpinnya dapat berjalan efektif, maka pemimpin harus melaksanakan dua fungsi utama yaitu fungsi yang pertama fungsi yang berhubungan dengan tugas menyangkut pemberian penyelesaian suatu masalah, informasi dan pendapat. Yang kedua fungsi yang berhubungan dengan pemeliharaan kelompok menyangkut segala sesuatu yang dapat membantu kelompok dapat berjalan lebih lancar, persetujuan dengan kelompok lain, dan penengahan perbedaan pendapat (Handoko, 2003: 299).

Memperhatikan peranan guru yang sangat strategis dalam proses pembelajaran, dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas kemampuan guru dan kinerjanya, meskipun ada faktor-faktor

lain yang terkait. Konsekuensinya, apabila kualitas pendidikan ditingkatkan maka kualitas kemampuan guru perlu ditingkatkan sehingga kinerja guru meningkat. Demikian juga sebaliknya, apabila kualitas pendidikan itu disinyalir kurang sesuai dengan harapan masyarakat, tentu yang lebih dulu mendapat tudingan adalah guru.

Menurut Koster (Handoko, 2003: 9), salah satu masalah yang sangat serius dalam bidang pendidikan di tanah air kita saat ini adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Banyak pihak berpendapat bahwa rendahnya mutu pendidikan merupakan salah satu faktor yang menghambat penyediaan SDM yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi tuntutan pendidikan bangsa di berbagai bidang.

Undang-undang RI Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab XI pasal 39 ayat 1 dan 2, menjelaskan bahwa kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan melakukan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Tugas-tugas profesional tersebut diatas jika dilaksanakan dengan baik maka kemampuan kompetensi guru akan meningkat sekaligus berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa yakni meningkatkan mutu pendidikan, baik secara regional, nasional dan internasional. Sebaliknya jika guru tidak

berkompeten dalam mengajar, maka berdampak negatif terhadap usaha peningkatan mutu pendidikan melalui proses belajar mengajar di sekolah.

Usaha peningkatan mutu pendidikan juga ditempuh dengan menggandeng berbagai pihak diantaranya penjaminan mutu berdasarkan standar tertentu seperti ISO yang ternyata tidak hanya dikhususkan untuk perusahaan tetapi juga dapat diterapkan dalam pengelolaan sekolah terutama pengelolaan sekolah menengah kejuruan.

Lembaga pendidikan tinggi, termasuk Sekolah Menengah Kejuruan Kelompok Teknologi dan Industri, merupakan lembaga formal yang mendidik dan melatih Sumber Daya Manusia (SDM) siap pakai. Produk sumber daya manusia ini diharapkan dapat bersaing dalam bursa tenaga kerja terampil siap pakai yang profesional. Diharapkan pula bahwa kelak siswa produk dalam lembaga ini dapat berkompetisi dalam sumber daya manusia terampil yang bakal sedemikian ketat, berpengetahuan, berketerampilan, dan berkemampuan dalam menghadapi tantangan serta pengelolaan teknologi tepat guna di masyarakat.

Namun demikian harus dicatat bahwa pendidikan formal adalah sesuatu yang multi dimensi, artinya gejala yang timbul di masyarakat tidak dapat direfleksi sepotong-potong, namun diperlukan pemahaman secara struktural agar didapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang kemampuan siswa Sekolah Menengah Kejuruan kelompok Teknologi dan Industri bekerja. Perkembangan dan perubahan sistem dan tata nilai kehidupan makin bervariasi sejalan dengan dampak yang ditimbulkan dari teknologi dan

ilmu pengetahuan. Teknologi merupakan pengetahuan dan ketrampilan yang menjadi andalan manusia untuk mempermudah dan memenuhi kebutuhan hidup serta menduduki fungsi ekonomis dalam kehidupan manusia.

Sistem manajemen mutu mempunyai maksud untuk membentuk sumber daya manusia yang profesional dan diharapkan dapat bersaing dalam bursa tenaga kerja terampil siap pakai yang profesional, siswa dapat berkompetisi untuk memenuhi sumber daya manusia terampil, berpengetahuan dan mampu dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya dan menghadapi tantangan persaingan. Asumsi di atas dapat dilihat dari daya serap yang melemah pada sumber daya manusia terutama pada siswa-siswa yang tidak memilih jalur program pengetahuan sumber daya manusia pada saat sekarang. Sebagai contoh kebutuhan tenaga kerja terampil dewasa ini merosot, dengan makin sempitnya lapangan kerja, meskipun produk pendidikan formal Kejuruan kelompok Teknologi dan Industri siap pakai masih banyak dibutuhkan, akan tetapi posisinya makin sempit karena persaingan yang makin ketat. Perusahaan-perusahaan hendak menempatkan SDM dengan keterampilan teknologi yang profesional dan bidang-bidang sesuai jurusannya, makin lama makin menuntut banyak prasarat untuk memenuhi kebutuhan organisasinya.

Sistem manajemen mutu sebenarnya untuk memenuhi perkembangan pasar tenaga kerja terampil saat ini, dengan indikasi kemampuan praktek secara profesional menjadi basis yang diperhatikan. Praktik kerja merupakan salah satu upaya untuk pembentuk tenaga kerja yang menguasai teknologi siap

pakai yang dimulai dari belajar secara otomatis, analitis dan kritis. Sangat diharapkan bahwa produk sekolah kejuruan menghasilkan sumber daya manusia yang dapat berfikir ke masa depan di dalam orientasi siap untuk menghadapi tantangan hidup dan menjawab perubahan dan perkembangan di berbagai bidang kehidupan di masa mendatang.

Siswa dipersiapkan dalam menjawab tantangan di masa mendatang yang sangat tergantung pada penempatan dirinya, akan berlaku atau bertindak seperti apa sebenarnya diri mereka dalam menekuni profesinya. Oleh sebab itu diharapkan agar pengetahuan maupun keterampilan dan sikapnya serta informasi mengenai kehidupan yang diterima oleh siswa (melalui pendidikan), hendaknya harus dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor ekonomi dan industri.

Permasalahannya, mampukah pendidikan yang ada memfasilitasi dalam proses kehidupan para siswa tersebut. Proses pembelajaran dalam Sekolah Menengah Kejuruan kelompok Teknologi dan Industri Salatiga berdialog dengan realita, bukan hanya *transfer of knowledge* atau *transfer of know how* belaka. Saat ini Sekolah menengah Kejuruan kelompok Teknologi dan Industri diperkenalkan dengan program manajemen mutu, yakni: *Multy Entry Level Training Program*. Sebagai layaknya orang yang sama sekali baru bergabung dengan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan kelompok Teknologi dan Industri, para siswa akan mendapatkan program praktik "*entry level*", yang pada dasarnya berada pada stage "*basic*". Praktek kerja di bengkel atau laborat pada fase ini (*multy entry level training program*) memiliki

peranan yang sangat strategis dan sangat menentukan. Eksistensi orientasi berfikir demi penguasaan teknologi terapan serta *sense of belonging* efektif sekali ditumbuhkan melalui praktik pada fase ini.

Salah satu faktor penyebab rendahnya kinerja guru adalah kompetensi profesional guru yang masih belum sesuai dengan situasi kondisi yang ada di sekolah, terkadang juga masih terdapat guru yang belum melakukan persiapan mengajar saat akan memulai proses PBM di kelas, sehingga kompetensi produktif yang seharusnya dicapai oleh siswa secara maksimal menjadi tidak optimal dan berdampak negatif terhadap usaha peningkatan mutu pendidikan melalui proses belajar mengajar. Demikian pula masih ada guru yang kurang produktif dalam mengajar saat pimpinan tidak berada di sekolah atau berhalangan hadir.

Berdasarkan asumsi di atas, permasalahan pokok dari sistem manajemen mutu adalah bagaimana menentukan model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung unsur pendidikan (guru, siswa, staf administrasi, masyarakat dan *stakeholder*) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan teknologi berdasar pendidikan. Pertimbangannya adalah melalui pemberian otonomi yang lebih besar pada sekolah, diharapkan sekolah kejuruan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pendidikannya, sehingga sekolah akan lebih mandiri.

Kepemimpinan secara umum merupakan seni atau proses mempengaruhi orang lain, sehingga mereka dengan penuh kemauan berusaha ke arah tercapainya tujuan organisasi. Kemudian dijelaskan bahwa kata *memimpin* mempunyai arti: memberikan bimbingan, menuntun, mengarahkan dan berjalan di depan (*precede*). Pemimpin berperilaku untuk membantu organisasi dengan kemampuan maksimal dalam mencapai tujuan. Ada beberapa pendapat tentang kepemimpinan. Menurut (Kartono, 2008: 153) kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan satu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah dicanangkan. Sedangkan Joseph C. Rost menyatakan bahwa kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersama (Safaria, 2004: 3). Pendapat Siagian menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan suatu kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain terutama bawahannya untuk berpikir dan bertindak sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangsih nyata dalam pencapaian tujuan organisasi (Anwar, 2004: 66). Kepemimpinan adalah satu kekuatan penting dalam rangka pengelolaan, oleh sebab itu kemampuan memimpin secara efektif merupakan kunci untuk menjadi seorang manajer yang efektif. Esensi kepemimpinan adalah kepengikutan (*followership*), kemauan orang lain atau bawahan untuk mengikuti keinginan pemimpin.

Dalam penelitian ini masalah yang akan diteliti adalah masalah yang berkaitan dengan faktor guru yaitu: pertama, faktor pengaruh kompetensi profesional; kedua, faktor sistem manajemen mutu yang secara khusus berkaitan dengan standar ISO di sekolah menengah kejuruan; ketiga, faktor kepemimpinan kepala sekolah yang merupakan koordinasi semua kegiatan yang ada di sekolah.

Berdasarkan konsep-konsep di atas, penulis berkesimpulan bahwa kompetensi profesional merupakan gambaran positif bagaimana melaksanakan tugas profesionalnya dalam kegiatan belajar mengajar yaitu menyampaikan/menyajikan sejumlah ilmu pengetahuan yang disajikan kepada siswa agar dapat terbentuk menjadi suatu pribadi yang utuh baik dari aspek pengetahuan, ketrampilan sesuai tuntutan kurikulum berbasis kompetensi 2004.

Oleh karena itu penulis memandang perlu melaksanakan suatu kajian secara mendalam tentang hubungan antara pengaruh kompetensi profesional, persepsi guru tentang sistem manajemen mutu dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru yang dicapai.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah kompetensi profesional, persepsi guru tentang sistem manajemen mutu dan kepemimpinan kepala sekolah, secara simultan berpengaruh terhadap kinerja guru pada SMK ber-ISO di Kota Salatiga?;

2. Apakah kompetensi profesional berpengaruh terhadap kinerja guru pada SMK ber-ISO di Kota Salatiga?;
3. Apakah persepsi guru tentang sistem manajemen mutu berpengaruh terhadap kinerja guru pada SMK ber-ISO di Kota Salatiga?;
4. Apakah persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru pada SMK ber-ISO di Kota Salatiga?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kompetensi profesional, persepsi guru tentang sistem manajemen mutu dan kepemimpinan kepala sekolah secara simultan terhadap kinerja guru SMK di Kota Salatiga;
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kompetensi profesional guru terhadap kinerja guru pada SMK ber-ISO di Kota Salatiga;
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh persepsi guru tentang sistem manajemen mutu terhadap kinerja guru pada SMK ber-ISO di Kota Salatiga;
4. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru pada SMK ber-ISO di Kota Salatiga.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupaun yang bersifat praktis yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa ada hubungan/keterkaitan antara faktor-faktor guru yaitu kompetensi profesional, persepsi guru tentang sistem manajemen mutu dan kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru;
2. Secara praktis: (1) Guru mata pelajaran dapat menggunakan sebagai acuan untuk melaksanakan program kegiatan belajar mengajar secara profesional, efektif dan efisien guna pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh; (2) Dinas pendidikan Kota Salatiga khususnya 1 SMK Negeri dan 2 SMK swasta ber-ISO di Kota Salatiga sebagai masukan untuk menempatkan guru sesuai bidang keahliannya/bidang studi yang diajarkan; (3) Praktisi pendidikan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat standar kompetensi agar menempatkan guru sesuai kemampuan yang dimilikinya.